

SKRIPSI

**PELAKSANAAN FUNGSI BPD DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DI DESA KEMIRI, KECAMATAN
TANJUNGSARI, KABUPATEN GUNUNGGIDUL**



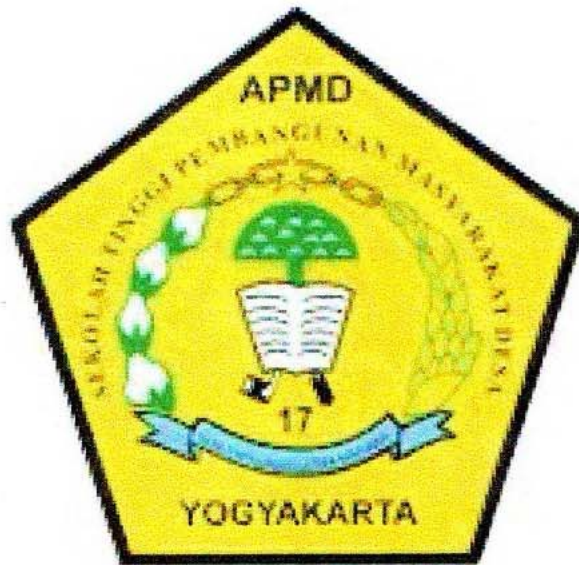
Disusun Oleh:

**SOLEMAN ANDRYAN DAPAKURI
13520057**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA
2018**

SKRIPSI

**PELAKSANAAN FUNGSI BPD DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DI DESA KEMIRI, KECAMATAN
TANJUNGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



Disusun Oleh:

**SOLEMAN ANDRYAN DAPAKURI
13520057**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA**



HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Februari 2018

Pukul : 10.00 WIB

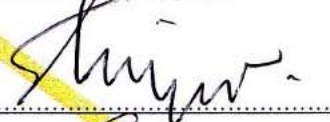
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

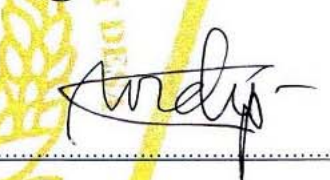
Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si
Pembimbing



Dra. Sri Utami, M.Si.
Penguji I




Drs. YB. Widyo Hari Purnomo, M.Si
Penguji II



Mengetahui,
Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)




Gregorius Sahdan, S.IP., MA.

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2018

MOTTO

**Belajarlh dari masa lalu, hiduplah di masa sekarang dan
rencanakan untuk hari esok**

**Kenikmatan terbaik di dalam hidup adalah melakukan
apa yang orang katakana kamu tidak bisa lakukan.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, kebahagiaan serta perjuangan saya mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

- ❖ Tuhan Yesus Kristus yang telah menjaga dan membimbing saya dan yang selalu memberikan hikmat dalam mengerjakan skripsi ini.
- ❖ Kedua orang tua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus yaitu Paulus K. Dapakuri (Ayah), Kornelia Reda Mata (Ibu), terima kasih atas dukungan doa, motivasi dan materil sehingga dapat menyelesaikan studi Ilmu Pemerintahan.
- ❖ Terimakasih kepada keluarga, dan teman seperjuangan selama saya berada di kota istimewa ini, terkhususnya terimakasih atas dukungan doa dan motivasi buat Febriani Empati Lia Lewu, Eunike Erlita Lero
- ❖ Terimakasih juga buat Keluarga Besar Pekaweti Yogyakarta yang telah memberikan pelajaran, pengalaman berorganisasi.
- ❖ Terimakasih juga buat teman-teman yang telah berbagi kisah susah dan senang dalam mengejar impian di kota istimewa Yogyakarta.
- ❖ Terimah kasih kepada almamater tercinta STPMD''APMD''
YOGYAKARTA.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Kepada Allah dan Yesus Kristus yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat melaksanakan kewajiban terakhir sebagai mahasiswa untuk melengkapi persyaratan sarjana S-1 melalui skripsi yang berjudul: PELAKSANAAN FUNGSI BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA(penelitian deskriptif kualitatif di desa Kemiri, kecamatan Tanjungsari, kabupaten Gunungkidul. DIY.

Tak ada gading yang tak retak. Begitulah pepatah bijak. Penyusun juga menyadari, bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana skripsi S-1 yang telah teruji sebelumnya, karena keterbatasan penyusun dalam memahami teori ilmu pengetahuan dan aplikasinya di lapangan penelitian ilmiah. Penyusun sangat berterima kasih atas setiap masukan, kritikan sekaligus dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini.

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah dan Yesus Kristus yang telah melimpahkan Rahmat, berkat dan tuntunan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Habib Muchsin, S.Sos, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Herawati, MPA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

5. Bapak Drs.Triyanto Purnomo Raharjo, BE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala Desa dan BPD serta masyarakat desa Kemiri yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara, menggali informasi dalam penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa STPMD'APMD'Yogyakarta angkatan 2013 yang telah menyulam kebersamaan.

Yogyakarta 21 Maret 2018

Soleman Andryan Dapakuri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRACT	x
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	6
1. Pengertian Desa	6
2. Pengertian Pemerintah Desa	8
3. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa.....	12
4. Pelaksanaan fungsi Badan permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.....	21
F. Ruang Lingkup Penelitian	24
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Lokasi penelitian dan subyek penelitian.....	25

3. Teknik pengumpulan data.....	26
4. Teknik Analisis Data.....	26
BAB II PROFIL DESA KEMIRI.....	28
a. Gambaran Umum Desa Pagerharjo	28
b. Pemerintah Desa.....	37
BAB III PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN	
 DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
 DESA.....	46
A. Deskripsi Informan.....	46
B. Pembahasan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	49
1. Pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan	
aspirasi masyarakat.....	49
2. Pelaksanaan fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati	
rancangan peraturan desa bersama kepala desa.....	53
3. Pelaksanaan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap	
kinerja pemerintah desa.....	56
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

Terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara lembaga masyarakat dan pemerintah desa . BPD sebagai wakil masyarakat desa diharapkan dapat mengembalikan fungsi kontrol eksekutif yang selama ini didominasi oleh kepala desa dengan tujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan kerja pemerintah Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dari penelitian ini mencakup Perangkat desa, Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Masyarakat umum dan Tokoh masyarakat. Untuk mengkaji data dari hasil penelitian ini menggunakan teknik reduksi data dan pengambilan kesimpulan.

Dari hasil penelitian didapati bahwa fungsi BPD di Desa Kemiri ini secara keseluruhan sudah cukup berjalan dengan baik walaupun dalam pelaksanaan fungsi BPD ini ada beberapa kendala seperti tidak adanya sarana seperti kantor untuk BPD sehingga aspirasi masyarakat hanya didengarkan secara lisan, disarankan kedepannya fasilitas pelayanan BPD lebih ditingkat lagi untuk menunjang kualitas BPD di Desa Kemiri.

Kata Kunci : BPD, Pemerintahan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah desa, potensi dan keanekaragaman desa, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada desa disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi desa dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah salah satu perubahan yang fundamental yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh sebab itu pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa juga bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil-wakil rakyat desa. Eksistensi lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki fungsi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa untuk membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa secara yuridis, tugas badan permusyawaratan desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi kontrol yang dimiliki Badan Permasyarakatan Desa (BPD) diarahkan kepada upaya terselenggaranya pemerintahan desa berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seharusnya membawa banyak perubahan yaitu, salah satunya terhadap peraturan daerah tentang produk hukum di desa. Produk hukum yang dimaksud adalah peraturan yang tertinggi yang ada di Desa yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan BPD yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat, sehingga peraturan daerah yang tidak sesuai lagi semangat dan substansinya tentang Produk Hukum di Desa perlu disesuaikan kembali. Isyarat perubahan produk hukum di Desa harus disesuaikan dengan turunan UU Desa yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa.

Dalam pasal 3 Permendagri No 110/2016 disebutkan tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya di era otonomi daerah, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Hal yang sangat penting dan menarik dalam struktur

pemerintahan desa adalah hadirnya Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi unsur pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis, dapat mengupayakan peningkatan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang memberikan nuansa yang berbeda dalam kehidupan demokrasi di desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dalam membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa, serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat. Mencermati hal tersebut maka di butuhkan anggota-anggota BPD yang handal dalam berperan sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tanggung jawabnya. Kualitas BPD dapat diukur dari lima hal, yaitu kapabilitas, akseptabilitas, responsibilitas, sosiabilitas, dan akuntabilitas. Menurut (Dwiyanto, 2006; 51)

Kelima hal ini merupakan tolak ukur terhadap kualitas ideal dari anggota-anggota BPD. Kelima indikator kualitas ini juga sekaligus merupakan kebutuhan yang harus segera dimiliki oleh anggota-anggota BPD agar dapat benar-benar berperan sebagai legislator dan kontroling yang mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

BPD sebagai lembaga perwakilan, salah satu fungsi yang diemban anggota BPD adalah sebagai penyambung suara yang akan memperjuangkan keinginan, harapan dan kebutuhan dari masyarakat yang diwakilinya. Dalam kerangka pelaksanaan fungsi tersebut, maka anggota BPD diharapkan dapat memiliki respon yang baik terhadap aspirasi yang ada di masyarakat. BPD juga harus dapat menjadi sarana untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah desa. Untuk menjalankan fungsi tersebut dengan baik, anggota BPD perlu memahami dan melaksanakan serta memfasilitasi masyarakat untuk menangkap aspirasi dari masyarakat.

Di desa Kemiri terkait dengan pelaksanaan fungsi BPD ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPD sarana prasarana yang kurang memadai bagi BPD untuk menjalankan fungsinya dengan baik, hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam proses penjangkauan aspirasi masyarakat karena BPD kurang aktif di dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat, dan juga menghambat keaktifan dan inisiatif untuk mengajak masyarakat berdiskusi dan mengadakan pertemuan supaya lebih dekat dengan masyarakat untuk dapat mendengarkan secara detail segala keluhan maupun keinginan dari masyarakat, adapun juga bahwa di desa Kemiri hanya sebagian dari masyarakat yang berperan aktif dalam berproses maupun berpartisipasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pertemuan pada saat membahas peraturan desa serta di dalam pengawasan kinerja pemerintah desa BPD harus lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktifitas yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dalam fungsi pengawasan ini benar-benar efektif untuk menciptakan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel.

Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan fungsi BPD bersama kepala desa sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, agar terwujud sistem pemerintahan yang baik, dan memberikan pelayanan yang memadai terhadap masyarakat di desa sebagaimana yang di cita-citakan bersama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi BPD dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Eko, S. (2014) *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: FPPD.
- Eko, Sutoro dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: FPPD.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdikarya
- Lexy J. Moleong. 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya
- Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yang Menerbitkan Graha Ilmu: Yogyakarta*. Dalam Penulisan Pengertian Pengelolaan, Pengertian Perencanaan dan Pengertian Pelaksanaan
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D* Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2009, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Widjaja,2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia ; Dalam Rangka sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* . jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Peraturan dan perundangan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri pasal 3 Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan
Desa

Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Laman web

(<https://forumwarga.or.id/peran-strategis-bpd-sebagai-lembaga-legislatif-desa/>)

<https://media.neliti.com/media/publications/1160-ID-fungsi-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-pengawasan-penyelenggaraan-pemerintahan-desa>

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Desa.>, Op. cit

<http://www.google.co.id/amp/s/updesa.com/bpd/amp/>